

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara tidak bisa lepas dari peran lembaga keuangan. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan serta menjaga perekonomian negara. Hal ini dikarenakan Perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>2</sup> Yang artinya lembaga ini berperan penting dalam menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dan berfungsi sebagai lembaga penyalur dana bagi pihak yang kekurangan dana. Sehingga, lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat vital dan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perkembangan yang signifikan telah di alami oleh lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peran lembaga keuangan tersebut dalam dunia perbankan khususnya syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia tidak dapat dipungkiri juga karena sebagian masyarakat di Indonesia adalah muslim.

---

<sup>2</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 32.

Oleh karenanya, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif yang berbasis Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan atau profit.<sup>3</sup>

Kelahiran lembaga keuangan mikro dilatarbelakangi oleh dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang menguasai perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan makro memiliki modal yang besar dan digerakkan dengan sistem yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah sulit mengakses dana dari lembaga keuangan makro tersebut. Selain itu, lembaga keuangan mikro dinilai lebih efektif karena konsentrasi mereka adalah pemberdayaan usaha mikro yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat kurang mampu. Dengan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, lembaga keuangan mikro telah berkontribusi

---

<sup>3</sup> Lailatul Badriyah, *Pengaruh Relationship Marketing dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik di Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 2.

besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.<sup>4</sup>

Lembaga Keuangan Syariah sebagai sebuah lembaga institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai visi dan misi yang tidak hanya sekedar mengejar keuntungan atau profit melainkan juga harus memiliki fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan umat Islam pada umumnya. Sehingga Lembaga Keuangan Syariah seharusnya dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk terendah.<sup>5</sup>

Lahirnya lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) memiliki peranan yang cukup signifikan khususnya dalam penyediaan modal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal tersebut. Di Indonesia, salah satu program yang dinilai efektif dalam memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro termasuk BMT.<sup>6</sup> Selain itu, BMT adalah media yang tepat untuk menciptakan *multiplier effect* pada komunitas masyarakat lokal dan menjadi pusat penghimpun dan penyalur zakat, infak, sedekah yang independen. Sehingga, dengan berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah seperti BMT dapat memberikan kemudahan

---

<sup>4</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018), hal. 10.

<sup>5</sup> Lina Marlina dan Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2, No. 1 April 2018, hal. 127.

<sup>6</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, ..., hal.10.

pelayanan jasa semi perbankan seperti penyediaan modal bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia.

Modal merupakan sebuah aset utama yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Dimana modal biasanya berbentuk dana atau uang. Dengan uang maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses bisnis mulai dari produksi sampai pada tahap pemasaran. Akan tetapi, bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang minim yang akan menjalankan sebuah bisnis baru tentunya memerlukan sebuah modal untuk menjalankan bisnis tersebut. Modal dalam hal ini memiliki peranan penting bagi seseorang yang akan melakukan kegiatan bisnis. Sehingga jalan satu-satunya yang diambil untuk mendapatkan modal agar kegiatan bisnisnya cepat terealisasi adalah dengan melakukan pengajuan pembiayaan di Lembaga Keuangan. Dalam istilah syariah penyediaan modal tersebut dinamakan Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan dalam melakukan penyaluran dana pada pihak ketiga selain lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Penyaluran dana berupa pembiayaan didasarkan atas rasa saling percaya antara pemilik dan penggunanya. Penerima pembiayaan wajib melakukan pengembalian dana sesuai dengan

waktu yang disepakati di dalam kontrak.<sup>7</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah di ubah kedalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>8</sup>

Seperti halnya KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar. KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung ini merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran di seluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil/ tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada di sekitarnya.<sup>9</sup>

Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor: 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal tanggal 30

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 304.

<sup>8</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal. 2.

<sup>9</sup> RAT BMT Pahlawan Tahun Buku 2018.

Maret 2010 dari kementerian UMKM. Dengan demikian maka keberadaan BMT secara hukum sudah terlindungi oleh Undang-undang. Sekarang BMT Pahlawan Tulungagung juga memiliki Nomor Induk Koperasi 3504120050003 yang telah ditanda tangani oleh Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Dengan menempati kantor Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor 104 Tulungagung sebagai Kantor Pusat.

KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung mengalami perkembangan yang cukup pesat mulai didirikannya pada tahun 1996 sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kantor cabang yang terletak di beberapa tempat yakni: Cabang Ngemplak di Ruko Tegal Arum Pasar Ngemplak, Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo. Keunggulan lain yang di miliki KSPPS BMT Pahlawan yaitu dapat dilihat dari segi pelayanannya yang mengutamakan pelayanan yang optimal mulai dari memberikan jasa pelayanan. Selain itu KSPPS BMT Pahlawan juga memiliki tim khusus yang disebut dengan *Surveyor*. Dari segi lokasi KSPPS BMT Pahlawan menempati wilayah yang cukup strategis yang mudah dijangkau dan mempermudah layanan.

Salah satu dari sekian banyak *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) yang berkembang baik adalah KSPPS BMT PETA yang memiliki kantor pusat di Tulungagung yang berada di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 15A Tulungagung. Keberadaan KSPPS BMT Peta ini telah banyak membantu perekonomian anggota dan masyarakat di sekitarnya, dengan memberikan

modal pinjaman kepada masyarakat untuk berwirausaha maupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Perkembangan KSPPS BMT PETA ini telah terbukti dengan adanya beberapa kantor cabang di daerah Jawa Timur yaitu di Trenggalek, Jombang, dan Blitar. Kemudian di daerah Jawa Tengah yaitu berada di Blora, Grobogan, dan Kudus.

KSPPS BMT PETA Blitar sendiri merupakan salah satu cabang baru dari KSPPS BMT PETA yang terletak di Kota Blitar Jawa Timur yang baru berdiri pada tanggal 10 November 2018. KSPPS BMT Peta Blitar ini terletak di wilayah yang cukup strategis yang terletak di pusat kota tepatnya di Jl. Anjasmoro No. 47, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar. Keunggulan yang dimiliki KSPPS BMT PETA Blitar yaitu dari segi pelayanan dimana pelaksanaan akad pembiayaan dan pencairan dapat dilakukan di rumah anggota. Hal ini bertujuan supaya anggota yang rumahnya jauh dari kantor dapat dijangkau dan bisa merasakan pelayanan yang prima. Selain itu, penerapan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) pada saat melayani anggota wajib untuk diterapkan. Hal ini bertujuan agar anggota atau orang yang sekedar bertanya-tanya merasa nyaman dan tidak ragu untuk datang ke KSPPS BMT PETA Blitar.

Selain keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut, keunggulan lain yang sama juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan maupun KSPPS

BMT PETA Blitar. Berikut ini adalah banyak jumlah anggota pembiayaan yang bergabung di KSPPS BMT Pahlawan maupun KSPPS BMT PETA.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2015	1.105
2	2016	1.176
3	2017	1.510
4	2018	1.522

*Sumber: Laporan RAT BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2016, 2017, 2018.*

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan KSPPS BMT PETA Blitar**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	September 2018	4
2	Oktober 2018	11
3	November 2018	14
<b>4</b>	<b>Desember 2018</b>	<b>22</b>
5	Januari 2019	30
6	Februari 2019	46
7	Maret 2019	63
8	April 2019	90
9	Mei 2019	104
10	Juni 2019	114
11	Juli 2019	127
12	Agustus 2019	159
13	September 2019	182
14	Oktober 2019	214
15	November 2019	235
<b>16</b>	<b>Desember 2019</b>	<b>243</b>
<b>16</b>	<b>Januari 2020</b>	<b>279</b>

*Sumber: KSPPS BMT Peta Blitar*

Setiap tahunnya jumlah anggota pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar terus mengalami perkembangan seperti yang tertera pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas.

Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan kepada para anggota tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan akan berpengaruh pada profitabilitas dan meningkatnya risiko kredit macet. Berikut adalah data kolektibilitas anggota pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kolektibilitas Anggota Pembiayaan KSPPS BMT Pahlawan Tahun 2015-2018**

Kolektibilitas	Jumlah Anggota			
	2015	2016	2017	2018
Lancar	884	941	1.208	1.218
Dalam Perhatian Khusus	66	71	91	91
Kurang Lancar	55	58	75	76
Diragukan	56	59	76	76
Macet	44	47	60	61
<b>Total</b>	<b>1.105</b>	<b>1.176</b>	<b>1.510</b>	<b>1.522</b>

*Sumber: KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung*

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kolektibilitas Anggota Pembiayaan KSPPS BMT PETA Blitar Tahun 2018**

Kolektibilitas	Jumlah Anggota			Keterangan
	2018	2019	2020	
Lancar	95%	93%	92%	Pada KSPPS BTM PETA Blitar penggolongan kolektibilitas hanya dibagi menjadi 2 yaitu lancar (Lancar, DPK) dan Macet (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).
Dalam Perhatian Khusus				
Kurang Lancar				
Diragukan				
Macet				
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

*Sumber: KSPPS BMT Peta Blitar*

Dalam mengajukan pembiayaan, terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur. Misalnya jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan jumlah pinjaman. Hal tersebut penting dilakukan guna sebagai bahan pertimbangan Lembaga Keuangan untuk menganalisis kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai lembaga keuangan yang berperan menyalurkan dana yang nantinya akan menghadapi risiko pembiayaan dan supaya lembaga keuangan tersebut berhasil dalam mengatasi risiko pembiayaan maka perlu dianalisis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi kredit macet. Sehingga, hal inilah yang menjadi permasalahan bagi lembaga keuangan dalam melakukan aktivitas pembiayaan. Sebab, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran yang telah diajukan oleh calon debitur.

Alasan memilih jumlah pendapatan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan dikarenakan menurut teori yang dikemukakan oleh Kasmir yang menyebutkan bahwa sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, maka lembaga keuangan harus terlebih dahulu melakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*). Jumlah pendapatan dalam hal ini termasuk kedalam kategori *condition of economy* yang artinya bahwa menilai pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada

sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.<sup>10</sup> Selain itu, menurut Kasmir penilaian pembiayaan juga harus dianalisis dengan analisis 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*). Dimana menurut analisis 7P ini, jumlah pendapatan termasuk ke dalam kategori *payment* yang merupakan suatu ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana kredit dikembalikan.

Kedua adalah jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.<sup>11</sup> Alasan memilih jangka waktu pinjaman sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan ini didasarkan atas teori yang dikemukakan oleh Kasmir. Menurut Kasmir, terdapat unsur-unsur kredit yang harus dipenuhi salah satunya adalah jangka waktu pinjaman yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian pembiayaan dan pelunasannya.<sup>12</sup>

Ketiga adalah jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan yang dimaksud disini adalah jumlah tanggungan keluarga yang memiliki definisi yaitu anggota keluarga debitur termasuk istri dan suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan

---

<sup>10</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 27.

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hal. 108.

<sup>12</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, ..., hal. 2.

masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang.<sup>13</sup> Alasan memilih jumlah tanggungan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan dikarenakan menurut teori yang dikemukakan oleh Kasmir yang menyebutkan bahwa sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, maka lembaga keuangan harus terlebih dahulu melakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*). Jumlah tanggungan dalam hal ini termasuk kedalam kategori *condition of economy* yang artinya bahwa menilai pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.<sup>14</sup> Menurut Samti, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka tingkat pengeluaran sehari-harinya juga akan semakin bertambah. Sehingga hal ini akan mengurangi jumlah pendapatan calon debitur yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengembalian pembiayaan.

Keempat adalah jumlah pinjaman. Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>15</sup> Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu waktu tertentu melalui

---

<sup>13</sup> Tri Andina Rahayu, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera”, *Jurnal Muqtasid* Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 64.

<sup>14</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, ..., hal. 27.

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 280.

angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Alasan memilih jumlah pinjaman sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan dikarenakan menurut teori yang dikemukakan oleh Kasmir yang menyebutkan bahwa sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, maka lembaga keuangan harus terlebih dahulu melakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*). Jumlah pinjaman dalam hal ini termasuk kedalam kategori *capital* yang dapat diartikan sebagai besarnya modal yang diperlukan peminjam.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan alasan tersebut. Maka, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah *Pertama*, jumlah pendapatan. *Kedua*, jangka waktu pinjaman. *Ketiga*, jumlah tanggungan dan *keempat*, jumlah pinjaman. Dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan yang didasarkan atas teori-teori yang telah dikemukakan diatas. Maka, pihak lembaga keuangan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan terhadap calon anggota tersebut serta dengan mengetahui adanya faktor diatas secara tidak langsung pihak lembaga keuangan dapat terhindar dari terjadinya kredit macet.

Oleh sebab itu, sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian**

---

<sup>16</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hal. 82.

## **Pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu jumlah pendapatan, jangka waktu pinjaman, jumlah tanggungan, dan nilai pinjaman. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas adalah:

1. Dari data yang dikumpulkan oleh peneliti persentase jumlah pendapatan yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.
2. Dari data yang dikumpulkan oleh peneliti persentase jangka waktu pinjaman yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.
3. Dari data yang dikumpulkan oleh peneliti persentase jumlah tanggungan yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.
4. Dari data yang dikumpulkan oleh peneliti persentase jumlah pinjaman yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah pendapatan ( $X_1$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.
2. Apakah terdapat pengaruh antara jangka waktu pinjaman ( $X_2$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.
3. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah tanggungan ( $X_3$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.
4. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah pinjaman ( $X_4$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan/bersama-sama antara Jumlah Pendapatan ( $X_1$ ), Jangka Waktu Pinjaman ( $X_2$ ), Jumlah Tanggungan ( $X_3$ ), dan Jumlah Pinjaman ( $X_4$ ) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pengaruh antara jumlah pendapatan ( $X_1$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.

2. Untuk menjelaskan terdapat pengaruh antara jangka waktu pinjaman ( $X_2$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.
3. Untuk menjelaskan pengaruh antara jumlah tanggungan ( $X_3$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.
4. Untuk menjelaskan pengaruh antara jumlah pinjaman ( $X_4$ ) terhadap tingkat pengembalian pembiayaan (Y) di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.
6. Untuk menjelaskan pengaruh secara simultan/bersama-sama antara Jumlah Pendapatan ( $X_1$ ), Jangka Waktu Pinjaman ( $X_2$ ), Jumlah Tanggungan ( $X_3$ ), dan Jumlah Pinjaman ( $X_4$ ) terhadap Pengembalian Pembiayaan (Y).

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Sebagai sumbangsih/bahan pengembangan bidang ilmu manajemen pembiayaan bank syariah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk Lembaga  
Sebagai sumbangsih pemikiran bagi lembaga untuk pengambilan keputusan dalam bidang kinerja keuangan.

b. Untuk Akademik

Sebagai sumbangsih Perbendaharaan Kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung.

c. Untuk Peneliti Lanjutan

Sebagai referensi/bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pada bidang yang sama dengan variabel yang berbeda.

**F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan-batasan supaya dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah variabel-variabel yang diteliti, populasi, dan juga sampel yang ada di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu terdiri dari variabel-variabel yang meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah Jumlah Pendapatan ( $X_1$ ), Jangka Waktu Pinjaman ( $X_2$ ), Jumlah Tanggungan ( $X_3$ ), dan Jumlah Pinjaman ( $X_4$ ). Sedangkan, variabel terikatnya adalah Pengembalian Pembiayaan (Y).

2. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang dihadapi, agar penelitian ini dapat membahas lebih tuntas dan dapat mencapai

sasaran yang diharapkan, perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah ini bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar. Faktor-faktor tersebut meliputi Jumlah Pendapatan, Jangka Waktu Pinjaman, Jumlah Tanggungan, dan Jumlah Pinjaman.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

- a. Pengembalian pembiayaan menurut Pradita, merupakan lancar atau tidaknya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank syariah, baik pinjaman pokok maupun bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.<sup>17</sup>
- b. Pendapatan didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).<sup>18</sup>
- c. Jangka waktu pelunasan kredit menurut Franciscus, merupakan waktu jatuh tempo debitur dalam membayar

---

<sup>17</sup> Kiswati dan Anita Rahmawaty, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hal. 7.

<sup>18</sup> Siti Maryam, *Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey pada KJKS BMT El-Gunung Jati)*, (Cirebon: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 26.

seluruh nilai pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman akan meringankan angsuran dan margin yang dibayarkan setiap bulannya. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.<sup>19</sup>

- d. Jumlah tanggungan menurut Samti adalah anggota keluarga debitur termasuk istri dan suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka tingkat pengeluaran sehari-harinya juga akan semakin bertambah. Sehingga hal ini akan mengurangi jumlah pendapatan calon debitur.<sup>20</sup>
- e. Jumlah pinjaman adalah besarnya realisasi kredit yang diterima nasabah (dalam satuan ribuan). Tidak semua debitur menggunakan pinjaman yang diterimanya untuk kegiatan yang bersifat produktif. Banyak debitur yang menyalahgunakan pinjaman yang mereka terima untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, terlebih lagi apabila debitur tersebut terbentur dengan masalah kesulitan keuangan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Isti'ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 24.

<sup>20</sup> Tri Andina Rahayu, "*Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera*", ..., hal. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 62-63.

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual maka dapat dijelaskan dari judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Blitar adalah untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pendapatan, Jangka Waktu Pinjaman, Jumlah Tanggungan, dan Jumlah Pinjaman sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengembalian pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.

Secara operasional bahwa dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan, jangka waktu pelunasan, jumlah tanggungan, nilai pinjaman, dan tingkat pendidikan terhadap pengembalian pembiayaan di KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PETA Blitar.

## H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

## 2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

### BAB I           Pendahuluan

Pada bab pendahuluan diuraikan menjadi secara singkat permasalahan yang akan dibahas ataupun yang ditemukan oleh peneliti, serta terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II           Landasan Teori

Membahas semua variabel yang akan diteliti berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Pada bab ini menjabarkan apa saja teori yang akan digunakan guna membahas variabel yang ada pada penelitian.

### BAB III          Metodologi Penelitian

Pada bab ini dijabarkan kevalidan data penelitian dengan menggunakan strategi mengatur latar penelitian. Bab ini mencakup beberapa sub bab yang meliputi: jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala

pengukurannya, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### BAB IV Laporan Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan. Data yang disajikan dapat berupa grafik maupun tabel yang disertai dengan penjelasan terhadap grafik maupun tabel tersebut secara jelas.

#### BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil pengolahan data.

#### BAB VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Penjabaran terhadap jawaban rumusan masalah yang dihasilkan dari temuan hasil analisis data dan interpretasi data merupakan bentuk dari kesimpulan. Temuan dan jawaban peneliti tersebut akan diselaraskan dengan manfaat penelitian guna untuk membuat sebuah saran

### 3. Bagian Akhir

Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Skripsi dan Daftar Riwayat Hidup.